



RESEARCH ARTICLE

PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI SALURAN MOBILITAS SOSIAL

Zaimudin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: zaimuddin@uinjkt.ac.id

Naskah diterima: 23 April 2017, direvisi: 26 Agustus 2017, disetujui: 23 November 2017

Abstracts

This article is an attempt by the author to observe the phenomenon of social mobility as the effect of Islamic education which is carried out so far. For this purpose the authors conduct a conceptual study on the development of education in the perspective of sociology, with the Qur'an as the foundation of the development of Islamic education as intended. Social mobility is essentially a movement of a person or group of people, both vertical and horizontal, to be an important point discussed in this article. In this case, there are at least three important roles that Islamic education carries. First, Islamic education as the foundation for social mobility. Secondly, Islamic education as a foundation for social stratification changes. Third, Islamic education as a channel for the movement of social mobility.

Keywords: *Islamic education, social mobility, social stratification.*

Abstrak

Artikel ini merupakan upaya penulis untuk mencermati fenomena mobilitas sosial sebagai efek dari pendidikan Islam yang dilaksanakan selama ini. Untuk maksud tersebut penulis melakukan kajian konseptual tentang pengembangan pendidikan dalam perspektif sosiologi, dengan Al-Qur'an sebagai landasan pengembangan pendidikan Islam sebagaimana dimaksud. Mobilitas sosial pada hakikatnya merupakan suatu gerak perpindahan seseorang atau kelompok orang, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal, menjadi poin penting yang dibahas dalam artikel ini. Dalam hal ini, setidaknya terdapat tiga peranan penting yang diemban oleh pendidikan Islam. *Pertama*, pendidikan Islam sebagai landasan bagi mobilitas sosial. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai landasan bagi perubahan stratifikasi sosial. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai saluran bagi gerak mobilitas sosial.

Kata Kunci: pendidikan Islam, mobilitas sosial, stratifikasi sosial.

A. Pendahuluan

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu *berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* [Al-Mujaadilah (58): 11].

Sengaja ayat di atas menjadi pembuka untuk mendiskusikan peran pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial didasarkan atas beberapa alasan.

Pertama, pada hakikatnya pendidikan itu dilaksanakan untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik. Upaya ini merupakan bentuk penyiapan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual dalam keimanan dan ketakwaannya, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Kedua, sejatinya pendidikan itu memiliki perspektif futuristik, ditandai dengan seluruh pemikiran, penjelasan-penjelasan, ujaran-ujaran, dan seluruh aktivitas pendidikan yang dimaknai sebagai upaya untuk mengubah tingkah laku menuju hari depan yang lebih baik. Maka seluruh usaha yang dilakukan dalam dunia pendidikan, tidak bisa diukur hasilnya sekarang dan dalam waktu dekat, melainkan mengacu kepada cita-cita ideal masa depan manusia.

Ketiga, Barat yang kini dipandang sebagai negara maju, pada abad ke-13 (masa *pre-Renaissance*) masih terkurung dalam zaman kegelapan. Sebaliknya di belahan Timur, Islam sedang mengalami kemajuan yang dibangun di atas fondasi iman dan ilmu pengetahuan. Peradaban Islam ini pada waktu itu berbasiskan petunjuk Al-Quran, kemerdekaan berfikir, dan penjelajahan potensi akal, tak pelak telah menciptakan kemajuan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika Eropa belum mengenal sabun dengan kebiasaan mereka yang

jarang mandi, kiranya pantas dipandang menjadi sebab terjadinya wabah “*black death*”,² yang memangkas jumlah populasi orang Eropa hingga seperempatnya.³ Di belahan Timur, orang-orang Islam dengan penuh gairah sudah mampu mengamati bintang-bintang dengan teleskop buatannya sendiri. Kini kondisinya sudah bertolak belakang, Barat mengalami kemajuan dan mencapai kegemilangan, sementara dunia Islam jauh tertinggal. Keteringgalan ini dapat dirunut dari keunggulan bangsa lain di luar Indonesia, seperti masyarakat Yahudi Israel, Hindu (India), Budhist-Konfusianis Cina (*Giant Dragon*), Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura (*Little Dragon*), Budhist-Taouis (Jepang), dan Budhist (Thailand).⁴

Uraian di atas mengantarkan kita pada satu pertanyaan: Pendidikan Islam ada di mana dalam kaitannya dengan mobilitas sosial dewasa ini? Pertanyaan besar ini akan diusahakan jawabannya dengan mengkaji konsepsi pendidikan Islam dalam perspektif sosiologi, hal mana konsepsi pendidikan Islam tersebut berlandaskan pada Al-Qur’an. Untuk memudahkan penjelasannya, tulisan ini akan dimulai dengan peristiwa mobilitas sosial, hakikat pendidikan, dan bagaimana memanfaatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam mobilitas sosial.

B. Konsep Mobilitas Sosial

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata “mobilitas” berarti kesiapsiagaan untuk bergerak. Asal kata ini memberikan pengertian bahwa mobilitas sosial merupakan gerakan berpindah-pindah dan gerak perubahan yang terjadi antara warga masyarakat, secara fisik maupun secara sosial.⁵

²Musyriyah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 221.

³Hans Fink, *Filsafat Sosial: Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas (Social Philosophy)*, terj. Sigit Djatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 33.

⁴Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 21-22.

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Empat (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 923.

¹Pasal 1 ayat (1) UU No. 20/2003 dan bandingkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto mengambil definisi yang dilakukan oleh Horton dan Hunt bahwa mobilitas sosial itu sesungguhnya merupakan gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial bisa berupa peningkatan atau penurunan status sosial dan biasanya termasuk segi penghasilan, yang dapat dialami oleh beberapa individu atau oleh anggota kelompok.⁶ Bila dirujuk dari proses keberhasilan seseorang untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi atau bahkan sebaliknya proses kegagalan seseorang sampai jatuh di kelas sosial yang lebih rendah juga disebut mobilitas sosial.⁷

Kimbal Young dan Raymond W. Mack mendefinisikan mobilitas sosial sebagai suatu gerakan dalam struktur sosial (*social structure*), yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, *social mobility* adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan individu dalam kelompoknya dan hubungan kelompok dengan kelompok lainnya. Jika seorang guru beralih pekerjaan menjadi pemilik percetakan buku, maka dia melakukan gerak sosial. Apabila seseorang yang semula mendapat gaji bulanan yang rendah, kemudian pindah pekerjaan karena tawaran gaji yang lebih tinggi, dapat dikategorikan sebagai contoh mobilitas sosial. Proses mobilitas sosial ini berlaku pada individu-individu, juga pada kelompok-kelompok sosial. Misalnya, golongan minoritas dalam masyarakat berasimilasi dengan golongan mayoritas juga masuk dalam mobilitas sosial.⁹ Keinginan untuk mencapai status sosial dan penghasilan yang lebih tinggi agaknya merupakan impian setiap orang. Namun demikian, berhasil atau kegagalan meraih impian itu menjadi kenyataan adalah

persoalan yang harus dipahami secara berbeda.¹⁰

Mobilitas sosial, dengan demikian, seyogyanya tidak selalu dipahami sebagai bentuk perubahan dan perpindahan dari tingkat rendah ke suatu tingkat lebih tinggi, karena mobilitas sosial dapat berlangsung dalam dua arah. Sebagian orang berhasil mencapai status lebih tinggi, untuk beberapa orang justru mengalami kegagalan. Sebagian orang yang lain masih tetap berada pada status yang dimiliki oleh orangtua mereka, alias berada di tempat.¹¹ Tingkat mobilitas sosial masing-masing masyarakat berbeda-beda. Pada masyarakat sistem kelas sosial terbuka, mobilitas sosial warga masyarakatnya akan cenderung tinggi. Sebaliknya pada sistem kelas sosial tertutup, seperti pada masyarakat feodal, atau sistem kasta, mobilitas sosial warga masyarakatnya akan cenderung rendah dan sulit dapat berubah.¹²

Mobilitas sosial berlangsung vertikal dan horizontal. Ada dua jenis mobilitas vertikal, yakni: *pertama*, gerak sosial ke tingkat lebih tinggi (*social climbing*), yakni gerak perpindahan anggota masyarakat di kelas sosial rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi. *Kedua*, gerak sosial yang menurun ke kelas sosial lebih rendah (*social sinking*), yakni gerak perpindahan anggota masyarakat ke kelas sosial lain yang lebih rendah posisinya.¹³ Secara keseluruhan masyarakat berubah kedudukannya dari suatu sektor terhadap sektor lain. Misalnya, buruh industri yang dahulu berkedudukan rendah, kini mendapat posisi yang baik setelah mendapat gaji lebih tinggi, kekuasaan politik lebih besar, kehidupan lebih baik dan terjamin, sehingga secara mereka mendapat status sosial lebih tinggi dan terhormat. Sangat mungkin pula suatu kelompok masyarakat merosot secara

⁶J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 208.

⁷J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, h. 208.

⁸Kimbal Young dan Raymond W. Mack, dalam Basrowi, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 65.

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 249.

¹⁰J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi: Teks ...*, h. 207.

¹¹J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi: Teks ...*, h. 208.

¹²Hans Fink, *Filsafat Sosial: Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas (Social Philosophy)*, terj. Sigit Djatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 17. J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi: Teks ...*, h. 208. Sumarsono Mestoko, dkk., *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 60.

¹³J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi: Teks ...*, h. 208-209.

menyeluruh. Misalnya, kedudukan guru di zaman dahulu begitu terhormat, lama kelamaan makin menurun dan terus turun kehormatannya. Terjadinya mobilitas sosial pada individu dari lapisan sosial yang satu ke yang lain, misalnya, perbedaan status sosial seseorang dibandingkan dengan orang tuanya juga sangat dimungkinkan terjadi.¹⁴

Alur mobilitas vertikal itu, menurut Soedjatmoko, sangat tergantung oleh kaku atau luwesnya struktur sosial di mana orang itu hidup. Seseorang dengan bekal pendidikan yang tinggi dan hidup di lingkungan masyarakat yang menghargai profesionalisme, sangat mungkin akan lebih mudah naik ke posisi lebih tinggi sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Sebaliknya, setinggi apa pun tingkat pendidikan seseorang, jika ia hidup di lingkungan masyarakat yang masih kuat nilai-nilai primordialisme dan sistem hubungan koneksi, kecil kemungkinan orang tersebut akan mudah naik jenjang kariernya dalam bekerja. Bahkan gelar sarjana bukan jaminan seseorang untuk mudah memperoleh pekerjaan, bila tidak punya *patront* atau pihak-pihak tertentu yang bisa memberikan rekomendasi atau *kateblece*.¹⁵

Dalam masyarakat modern, orang dapat naik atau turun statusnya atas dasar golongan sosial, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Perpindahan orang dari golongan sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah disebut mobilitas sosial vertikal. Pada masyarakat industri, mobilitas sosial itu berlangsung terus tanpa henti karena kebutuhan terhadap sejumlah besar tenaga teknis-profesional. Apabila golongan sosial yang tinggi tidak lagi sanggup memenuhi segala kebutuhan itu, untuk memenuhinya akan diambil dari lapisan sosial yang lebih rendah. Mereka yang lahir dalam golongan atas yang tidak mampu memotivasi untuk memperoleh kemampuan teknis, profesional, managerial, dengan sendirinya turun tangga sosialnya. Realitas empiris ini menegaskan terjadinya perubahan sosial tanpa dapat dicegah oleh siapapun.¹⁶

Sejak Indonesia merdeka, banyak jabatan yang dahulu hanya dipegang oleh orang Belanda, segera ditempati oleh orang Indonesia. Dahulu orang Indonesia hanya dapat menjadi penilik sekolah, sekarang ia dapat menjadi Kepala Sekolah-Madrasah, Direktur Jenderal Pendidikan, bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu juga dengan bidang-bidang pekerjaan lainnya, pemerintahan maupun swasta. Gerakan industrialisasi membuka jabatan-jabatan baru yang memerlukan tenaga teknis, profesional, dan manajerial. Dipertegas lagi dengan pengembangan pendidikan untuk memenuhi tenaga kerja bagi pembangunan yang kian meningkat, khususnya pendidikan tinggi.¹⁷

C. Prinsip Umum Mobilitas Sosial

Alur gerak sosial itu sendiri mengikuti prinsip-prinsip umum. *Pertama*, hampir tak ada masyarakat yang sistem lapisan sosialnya mutlak tertutup, sama sekali tak ada gerak vertikal. Sebagai contoh adalah masyarakat berkasta di India. Walaupun gerak sosial vertikal hampir tidak tampak, proses perubahan sosial itu pasti ada. *Kedua*, betapa pun terbukanya sistem lapisan sosial dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial vertikal dilakukan dengan bebas, akan ada hambatan-hambatan. *Ketiga*, tidak ada gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat, karena tiap masyarakat mempunyai ciri-ciri sendiri bagi gerak sosial vertikalnya. *Keempat*, laju gerak sosial vertikal karena faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan adalah berbeda. *Kelima*, berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal dari faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan tak ada kecenderungan kontinyu perihal bertambah atau berkurangnya laju gerak sosial.¹⁸

Saluran-saluran mobilitas sosial yang terjadi itu menggunakan media-media yang ada di masyarakat. Menurut Pitirina A. Sorokin, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses gerak sosial vertikal

¹⁴S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, h. 38.

¹⁵J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi: Teks...*, h. 209.

¹⁶S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, h. 35-36.

¹⁷S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, h. 37.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 251-252.

melalui saluran tadi disebut *social circulation*. Selanjutnya Sorokin menegaskan, saluran gerak sosial yang terpenting adalah: angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian.¹⁹ Dengan demikian, pendidikan menduduki babak baru dalam saluran mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal.

D. Pendidikan sebagai Landasan bagi Mobilitas Sosial

Pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradaban manusia.²⁰ Di dalamnya merupakan proses menumbuhkembangkan *fitriah* manusia.²¹ Pendidikan juga merupakan sistem bimbingan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan potensi manusia. Karenanya, nilai universal pendidikan dapat dilihat pada orientasi pendidikan itu sendiri, yaitu sistem bimbingan dengan sasaran *pemanusiaan manusia*.²²

Bukan suatu kebetulan jika upaya memajukan kesejahteraan umum dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diletakkan dalam satu rangkaian dalam empat misi pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).²³ Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan diyakini oleh para pendiri negara ini, mempunyai keterkaitan yang kuat dengan upaya memajukan kesejahteraan umum yang prosesnya dalam perspektif sosiologi dikenal sebagai mobilitas sosial. Maka secara konstitusional diamanatkan agar pemerintah membentuk suatu sistem pendidikan nasional.²⁴

¹⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 252.

²⁰Fuad Hassan, *Pendidikan adalah Pembudayaan* dalam Tonny D. Widiastono (ed), *Pendidikan Manusia Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), h. 55.

²¹Armai Arief, *Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: CRSD Press, 2005), h. 43.

²²Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h.112.

²³Lihat alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

²⁴Berbeda dengan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lama membagi dua, pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, UU Nomor 20 Tahun 2003 membagi tiga jenis: pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Yang terakhir ini diperkenalkan oleh Coombs *et al*, yang menawarkan konsep pendidikan seumur hidup atau hidup adalah belajar. Lihat

Dalam konteks Islam, juga bukan suatu kebetulan, wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW berupa perintah untuk membaca (*iqra*). Komaruddin Hidayat menegaskan, perintah membaca dalam wahyu itu, sungguh luar biasa cerdas.²⁵ Selanjutnya, konsisten dengan perintah ini, jauh sebelum UNESCO mengintroduksi konsep belajar sepanjang hayat, Islam lebih dulu memerintahkan penganutnya untuk menuntut ilmu sejak dalam buaian sampai ke liang lahat. Hal ini tidak mengherankan, karena Islam telah menegaskan: siapa yang ingin sukses di dunia ini, ada ilmunya; siapa yang ingin sukses di akhirat, ada ilmunya; dan siapa yang ingin sukses di dunia-akhirat, juga ada ilmunya.

E. Pendidikan Islam sebagai Landasan bagi Perubahan Stratifikasi Sosial

Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan lebih baik di masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diraih makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan sosial yang lebih tinggi. Maka pendidikan menjadi jembatan untuk menyeberang dari golongan lebih rendah ke golongan lebih tinggi. Singkatnya, pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial.

Pada zaman dahulu keturunan menentukan status sosial seseorang yang sukar ditembus, karena sistem golongan yang ketat dan tertutup. Walaupun demikian, tokoh-tokoh pendidikan banyak yang menaruh kepercayaan akan kemampuan pendidikan untuk memperbaiki nasib seseorang. Dengan memperluas dan pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan, diharapkan dapat dirobohkan tembok-tembok pembatas golongan-golongan sosial. Diharapkan, kesempatan belajar yang sama membuka jalan bagi setiap anak untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pendidikan universal memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak dari semua golongan

Wahjudi Ruwiyanto, *Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Masyarakat Miskin: Pendekatan Analisis Organisasi secara Kuantitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 1. Lihat Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

²⁵Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama: Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun* (Jakarta: Hikmah, 2007), h. 168.

sosial. Dengan demikian, perbedaan golongan sosial akan dikurangi bila memang tidak dapat dihapuskan seluruhnya. Tentu cita-cita itu memang tidak mudah diwujudkan.²⁶ Jadi, walaupun terdapat mobilitas sosial secara sektoral, banyak pula golongan rendah yang tetap dianggap rendah. Namun, kedudukan golongan rendah tidak statis, melainkan dinamis, terus bergerak maju bila diberi pendidikan yang lebih memadai dan bermutu.²⁷

Banyak contoh-contoh tentang orang yang naik status sosialnya berkat pendidikannya. Dahulu orang yang menyelesaikan pelajarannya pada HIS,²⁸ SD zaman Belanda, mempunyai harapan menjadi pegawai dan mendapat kedudukan sosial terhormat. Apa lagi kalau ia lulus MULO,²⁹ AMS,³⁰ atau Perguruan Tinggi, makin besarlah kesempatan untuk mendapat kedudukan yang baik dan masuk golongan sosial menengah ke atas.³¹

Kini pendidikan SD bahkan SMA hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial. Iklan mencari pesuruh kantor mengundang lamaran dari lulusan SMA. Apalagi bila kewa-

jiban belajar ditingkatkan sampai SMA, maka ijazah SMA tidak ada artinya lagi dalam mencari kedudukan yang tinggi. Kini pendidikan tinggi dianggap suatu syarat bagi mobilitas sosial, lulusan perguruan tinggi itupun kini sudah bertambah makin sukar untuk memperoleh kedudukan lebih baik.³²

Selain ijazah perguruan tinggi, ada lagi faktor-faktor lain yang membawa seseorang kepada kedudukan tinggi dalam pemerintahan atau dalam dunia usaha. Anak-anak golongan rendah lebih sukar mendapat kedudukan sebagai pimpinan perusahaan dibandingkan dengan anak pemimpin perusahaan itu sendiri. Hubungan pribadi, rekomendasi dari orang yang berkuasa, selain ijazah dan prestasi turut berperan untuk mendapat posisi lebih tinggi. Mobilitas sosial secara individual cukup kompleks, karena berbagai macam faktor yang membantu seseorang meningkatkan kedudukan sosialnya. Bahkan dapat diyakini bahwa dengan makin bertambahnya lulusan perguruan tinggi, dapat diduga akan makin berkurang jaminan untuk meningkat status sosial.³³

Pendidikan tinggi masih sangat selektif untuk menerima mahasiswa barunya. Tidak semua orang tua mampu membiayai studi anaknya di perguruan tinggi. Dengan kebijakan menggunakan komputer untuk menilai tes seleksi masuk perguruan tinggi, sedikit ada jaminan untuk menjadi semakin objektif. Artinya tidak lagi dipengaruhi kedudukan orang tua atau orang yang memberikan rekomendasi. Cara itu membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah untuk memasuki perguruan tinggi atas dasar prestasinya. Biaya yang cukup banyak tentu selalu merupakan hambatan bagi golongan rendah untuk menyekolahkan anaknya di universitas. Tawaran beasiswa yang makin banyak dan bervariasi dari pemerintah dan kesempatan untuk mengadakan pinjaman dari bank untuk studi di perguruan tinggi, kiranya dapat memperluas kesempatan belajar bagi mereka yang berbakat dengan latar belakang ekonomi lemah.³⁴

²⁶S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 38.

²⁷S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 39.

²⁸Hollands *Inlandse School*. HIS ini merupakan lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat, khususnya mempelajari bahasa Belanda sebagai kunci untuk pendidikan lanjutan, pintu kebudayaan Barat, syarat untuk memperoleh pekerjaan. Bahasa Belanda memberikan prestise dan memasukkan seseorang ke dalam golongan intelektual dan elite. Kurikulum HIS seperti tercantum dalam Statuta 1914 No. 764 meliputi semua mata pelajaran Europese Lagere School (ELS) bukan kelas satu dengan pembedaan bahwa juga diajarkan membaca dan menulis bahasa daerah dalam aksara Latin dan bahasa Melayu dalam tulisan Arab dan Latin. Bila tidak ada kebutuhan akan kedua bahasa itu dapat ditiadakan saja, misalnya untuk anak Belanda dan Cina. Lihat S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 114-115.

²⁹*Meer Uitgebreid Lager Ondernwijs* (MULO) merupakan sekolah dasar dengan program yang diperluas. Program terdiri atas 4 bahasa: Belanda, Perancis, Inggris, dan Jerman. Setengah waktunya digunakan untuk pelajaran bahasa, sepertiganya untuk matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan seperenam untuk ilmu pengetahuan sosial. Lihat S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, h. 123.

³⁰*Algemene Middlebare School* (AMS) Bagian A mengutamakan sastra dan sejarah, dan Bagian B mengutamakan matematika dan fisika. Bagian A dibagi dalam Bagian A I untuk studi klasik Timur dan Bagian A II untuk studi klasik Barat. Lihat S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, h. 138.

³¹S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, h. 39.

³²S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, h. 39.

³³S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, h. 39-41.

³⁴S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, h. 41.

Lembaga pendidikan seperti sekolah atau madrasah, umumnya merupakan saluran konkrit mobilitas sosial vertikal. Bahkan, sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah dianggap sebagai *social elevator* yang bergerak dari kedudukan-kedudukan yang paling rendah di mana sekolah atau madrasah tertentu hanya dapat dimasuki oleh golongan-golongan masyarakat tertentu pula, misalnya dari lapisan atas, atau dari suatu suku atau golongan tertentu. Sekolah atau madrasah tersebut jika dapat dimasuki oleh lapisan sosial yang rendah, maka akan menjadi saluran gerak sosial vertikal. Di Indonesia, secara relatif dapat ditelaah kedudukan apa yang ditempati oleh mereka yang hanya tamat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi, meskipun belum menunjukkan adanya kedudukan yang sesuai bagi mereka dalam hal-hal tertentu.³⁵

Secara empiris, peran pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial, sebagai contoh, dapat dijumpai pada masyarakat Amerika Serikat dan Jepang. Inggris dan Jerman pada abad ke-19, adalah dua negara yang terkenal dengan keunggulan industrinya. Pada waktu itu, Amerika Serikat mengirim ribuan mahasiswanya untuk belajar ke Jerman agar mereka dapat mentransfer kemajuan industri dan intelektualisme Jerman ke Amerika Serikat. Universitas Berlin dan Universitas Humboldt di Jerman, merupakan contoh rujukan bagi pengembangan universitas riset di Amerika Serikat, misalnya, John Hopkins University. Pengembangan Perguruan Tinggi Negeri (*State University*) di Amerika Serikat dalam memajukan pertanian dan pengembangan industri sebagai soko guru kemajuan industrinya, dapat dipastikan bahwa idenya diperoleh dari para mahasiswa Amerika Serikat yang belajar di Eropa.³⁶

Jepang pada era restorasi Meiji (pertengahan abad ke-19), mengirim ribuan mahasiswanya belajar ke Eropa dan Amerika Serikat. Hasil dari usaha ini antara lain, pada permulaan abad ke-20, Angkatan Laut Jepang dapat

mengalahkan Angkatan Laut Rusia. Kemajuan teknologi dan industri perang Jepang telah dikembangkan dalam menghadapi tentara-tentara sekutu pada Perang Dunia II. Seorang Laksamana Jepang yang hebat pada Perang Dunia II adalah Laksamana Yamamoto, yang merancang penghancuran armada ketujuh (*Seventh Fleet*) di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Yamamoto pernah menjadi mahasiswa Harvard University yang mempelajari ilmu perminyakan pada tahun 1930-an.³⁷

Belajar dari kemajuan negara-negara industri modern dewasa ini, seyogyanya dipahami bahwa sektor pendidikan memainkan peran penting bagi kemajuan bangsa. Negara-negara industri maju (G-8), ketika dahulunya masih pada tahap seperti negara-negara berkembang, mempunyai misi yang jauh ke depan. Mereka melihat peran pendidikan dalam memantapkan kehidupan politiknya, sejalan dengan perbaikan kehidupan ekonominya. Negara-negara G-8 tersebut hingga kini tetap menjadikan pendidikan sebagai prioritas kepemimpinannya di dunia yang semakin terbuka dewasa ini.³⁸

Demikian juga dengan Korea Selatan. Lee Myung-bak, Presiden Korea Selatan, pada pembukaan *APEC Education Ministerial Meeting* ke-5 di Gyeongju, Korea Selatan pada 22 Mei 2012, menegaskan bahwa pendidikan dipandang sebagai kebijakan yang sangat penting dalam mempersiapkan anak bangsa yang bakal menjadi warga masyarakat global. Pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang unggul dan mampu bekerja sama. Pendidikan diyakini akan dapat membawa perubahan dan kemajuan suatu bangsa. Argumen inilah yang dijadikan landasan pembuktiannya bahwa Korea Selatan yang bisa maju ini karena memberikan prioritas kebijakan pembangunan kepada sector pendidikan. Buktinya, dalam 60 tahun, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan meningkat karena sektor pendidikan dibenahi terlebih dahulu. Awalnya miskin, tetapi Korea Selatan kini melangkah menjadi negara maju. Pendidikan

³⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 253.

³⁶H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 6.

³⁷H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar...*, h. 6.

³⁸H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar...*, h. 6-7.

menciptakan keajaiban yang luar biasa bagi kemajuan bangsa.³⁹

F. Pendidikan Islam sebagai Saluran Gerak Mobilitas Sosial

Para sosiolog mencoba menjelaskan proses terjadinya mobilitas sosial akibat gerakan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ketika kehidupan masyarakat masih berada dalam kondisi primitif, lembaga yang disebut sekolah itu belum dirasakan kebutuhannya oleh mereka. Proses belajar yang dilaksanakan selain melalui keluarga, anak-anak masyarakat primitif mempelajari segala sesuatu dengan menyaksikan secara langsung, untuk selanjutnya mengimitasinya. Karena kebutuhan untuk hidup dalam masyarakat itu belum terlalu kompleks, pendidikan keluarga seperti itu sudah dipandang cukup untuk memenuhi hajat hidup masyarakatnya. Di pihak lain, kebutuhan lembaga sekolah itu baru mulai muncul ketika kebudayaan memasuki tahap sangat kompleks. Pada tahap ini pengetahuan yang dianggap perlu oleh masyarakat yang mengusungnya, tidak mungkin lagi ditangani oleh lingkungan keluarga atau masyarakat secara umum, melainkan mesti dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara khusus mengurus bidang pendidikan.⁴⁰

Di Barat pun, demikian dikatakan oleh Robert Angus Buchanan, sejak awal adanya manusia, cara memperoleh keahlian (yang dinilai bersifat rahasia) diperoleh melalui proses magang, melayani seorang empu. Hal ini berlangsung sampai abad ke-20. Perubahan ke sistem akademik (persekolahan) terjadi, ketika banyak bermunculan keahlian baru bukan dari sistem magang. Jadilah, lembaga pendidikan formal yang mampu mengkonstruksi suatu kurikulum sesuai dengan jenjangnya yang siap dihadirkan kepada peserta didik.⁴¹

Dewasa ini, masyarakat sudah hidup pada level kebudayaan yang sangat kompleks dan semakin kompetitif. Maka sekolah sudah dirasakan menjadi kebutuhan pokok. Kebijakan wajib belajar 9 tahun oleh pemerintah,⁴² merupakan cerminan dari kenyataan ini. Demikian juga alokasi dana untuk sektor pendidikan 20% dari total APBN sebagaimana diamanatkan UUD 1945 merupakan kebutuhan mendesak dalam sektor pendidikan.⁴³ Dengan demikian, pendidikan hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan menuju generasi masa depan yang sukses dunia dan akherat dalam membangun *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* dalam mengemban tugas-tugas kehidupan yang lebih baik.

Sejarah telah memastikan bahwa hampir setiap pembaharu menekankan pendidikan, karena pendidikan merupakan *locus* untuk mengembangkan wacana dan mempengaruhi pamikiran masyarakat.⁴⁴ Memang, pendidikan tidak identik dengan sekolah.⁴⁵ Tetapi menunjuk pada pengalaman masyarakat di Barat,⁴⁶ lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama yang berperan dalam mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Ada kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Hal ini yang memunculkan tesis "*Human Investment*" yang menyatakan, investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, karena

³⁹"Pendidikan Kunci Perubahan Bangsa" dalam *Kompas*, Rabu, 23 Mei 2012.

⁴⁰Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, *Sosiologi (Sociology)*, terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari, cet. 4, ed. 6 (Jakarta: Erlangga 1996), h. 333.

⁴¹Robert Angus Buchanan, *Sejarah Teknologi (History of Technology)*, terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Pall Mall, 2006), hal. 149.

⁴²Kebijakan ini digulirkan pada masa pemerintahan orde baru (era Presiden Soeharto). Pascareformasi, melalui amandemen UUD 1945, kebijakan ini diberi landasan konstitusional meskipun agak terlambat. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

⁴³Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "Negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

⁴⁴Moh. Asror Yusuf, *Persinggungan Islam dan Barat: Studi Pandangan Badiuzzaman Said Nursi* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), h. 114.

⁴⁵Fuad Hassan, "Pendidikan adalah Pembudayaan" dalam Tonny D. Widiastono (ed), *Pendidikan Manusia Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), h. 53.

⁴⁶Robert Angus Buchanan, *Sejarah Teknologi (History of Technology)*, terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Pall Mall, 2006), h. 149.

memiliki *economic rate of return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.⁴⁷

Sistem pendidikan sekolah diharapkan banyak memberi sumbangan terhadap masyarakatnya. Dalam konsep pendidikan modern, telah terjadi pergeseran pendidikan, yakni adalah pendidikan di dalam keluarga bergeser ke pendidikan di sekolah dan guru adalah tenaga yang profesional daripada sekadar tenaga sambilan. Hal ini mengandung makna, pendidikan sekolah merupakan tumpuan utama bagi masyarakat, sehingga menuntut penanganan yang serius dan profesional terutama dari kalangan gurunya. Sungguh pun demikian, kita perlu merenungkan kritik keras Paulo Freire terhadap pendidikan sekolah, karena menurutnya, selama ini pendidikan sekolah hanya merupakan menara gading yang tak kenal apalagi mewarnai perubahan terhadap masyarakat sekitarnya. Kritik ini perlu dijawab agar keberadaan sekolah lebih fungsional dan memberi makna bagi pembangunan masyarakatnya.⁴⁸

Khusus untuk sekolah yang memasang label "Islam," maka kritik Paulo Freire harus direspons dengan pertanggungjawaban penuh kesungguhan dalam bentuk menegawantahkan konsep *sibghah*. *Sibghah* identik dengan pembaptisan. Menurut 'Abdullah Yusuf Ali, arti kata ini meliputi makna celup atau warna. Menurut orang-orang Arab Nasrani dahulu mencampur bahan celup atau warna ke dalam air baptis, yang berarti bahwa orang yang dibaptis mendapat warna baru dalam kehidupannya. Kita (orang Islam) tidak percaya bahwa untuk mendapatkan keselamatan, orang perlu dibaptis. Pembaptisan kita yang lebih tinggi adalah "Pembaptisan" yang datang dari Allah, yang dengan demikian kita menerima warna (secara simbolis) Allah, dan menyerapkan segala kebaikan-Nya ke dalam diri kita.⁴⁹

⁴⁷Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001), h. 3.

⁴⁸Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 112.

⁴⁹Lihat 'Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya (The Holy Qur'an)*, terj. Ali Audah (Pustaka Firdaus: Jakarta, 1993), h. 56.

sebagaimana ditegaskan Alquran dalam Surah al-Baqarah ayat 138: "(Agama) kami adalah pembaptisan Allah dan siapakah dapat membaptis lebih baik daripada Allah? dan kepada-Nyalah kami menyembah."

Sekolah Islam sejatinya mampu mencelup (mewarnai) para peserta didiknya dengan totalitas nilai-nilai keislaman (*kaafah*) mulai dari individu-individu, sosial, dan seluruh umat Islam. Dengan nilai-nilai Islam inilah diharapkan terbentuk suatu masyarakat yang sanggup mengusung dan mempraktikkan nilai-nilai keislaman, sehingga kehadiran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta tidak sebatas kata-kata, tetapi teraktualisasikan dalam kenyataan.

Masalahnya adalah bagaimana agar proses dan hasil pendidikan mampu memberikan perubahan terhadap masyarakat sekitarnya? Tak pelak bahwa rekonstruksi sosial dalam pendidikan menjadi pilihan jawaban. Teori ini menitikberatkan pada tugas pendidikan sebagai upaya pengembangan aspek individual dan pengembangan aspek tanggung jawab kemasyarakatan, bersikap proaktif dan antisipatif menghadapi permasalahan masyarakat di masa depan.⁵⁰

Dalam merespon tantangan tersebut, diperlukan teori pendidikan rekonstruksi sosial berlandaskan tauhid. Argumen utama yang melandasinya sebagai berikut. *Pertama*, masyarakat selalu membutuhkan perubahan melalui upaya *amar ma'ruf nahi munkar*. *Kedua*, perubahan sosial itu melibatkan rekonstruksi pendidikan maupun pemanfaatan pendidikan dalam rekonstruksi masyarakat. *Ketiga*, manusia adalah konstruktivis, bahkan konstruktivis sosial. Pada *era post* modern dengan ciri percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan infrastruktur sosial dan perkembangan tuntutan dunia kerja menjadi semakin penting melakukan persiapan lebih intens untuk melakukan rekonstruksi sosial.⁵¹

Rekonstruksi sosial ini berangkat dari *bottom-up* yang dibangun dari *grass root*, dalam

⁵⁰Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, h. 113.

⁵¹Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, h. 113.

pluralisme, dan dalam konteks mengejar keunggulan. Dengan demikian, akan tampak bahwa pelaksanaan pendidikan akan lebih bersifat proaktif dan antisipatif. Dikatakan *proaktif*, karena berusaha untuk mencari jawaban dan sekaligus memperkirakan perkembangan ke depan atas situasi dan kondisi serta permasalahan yang terjadi. Dikatakan *antisipatif*, karena permasalahan yang terjadi itu akan dipecahkan menuju kepada perubahan yang lebih ideal.⁵²

Tugas pendidikan adalah untuk membantu peserta didik agar menjadi cakap dan mampu ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakatnya melalui upaya *amar ma'ruf nabi munkar*. Untuk mewujudkannya diperlukan aktivitas pendidikan yang komitmen terhadap pengembangan kreativitas secara berkelanjutan, sehingga khazanah budaya bisa diperkaya, nilai-nilai insani dan Ilahi juga diperkaya isinya, serta produktif (baik dari segi ekonomi, estetika, sosial, kultural, dan sebagainya). Al-Qur'an QS Ali Imran ayat 104 menyebutkan:

”Dan hendaklah ada di antara kamu (wahai orang-orang yang beriman) segolongan umat yang mengajak orang lain secara terus-menerus tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan atau petunjuk-petunjuk Ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang *ma'ruf*, yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik oleh masyarakat mereka selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiah, dan mencegah mereka dari yang *munkar*, yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat. Mereka yang mengindahkan tuntunan ini adalah orang-orang yang beruntung, yakni mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam kehidupan dunia dan akhirat.”

Di dalam QS al-Hasyr (59): 18 dijelaskan berikut ini:

”Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri (individu) melakukan *nazhar* terhadap segala sesuatu (ide, konsep, dan

rencana kerja, dan sebagainya) yang telah diajukan atau ditawarkan untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pemberi khabar terhadap prestasi kerjamu.”

Merujuk pada pandangan Al-Raghib al-Asfahani bahwa melakukan *nazhar* dapat berarti selalu melakukan perubahan cara pandang dan kerangka pikir untuk menangkap dan merenungkan serta menguji dan memeriksanya secara cermat. Produknya adalah berpikir dan berpandangan alternatif serta mendekatinya dari berbagai perspektif dalam mengantisipasi masa depan. Diingatkan, misalnya, sebelum dan sesudah melakukan *nazhar* dituntut untuk tetap komitmen terhadap ajaran-ajaran-Nya (takwa), walaupun tidak harus tampil secara hitam-putih, tetapi lebih banyak memberi nuansa, dan dalam interaksi *pluralism* dimungkinkan adanya tumpang tindihnya kesepakatan tata nilai. Dalam konteks ajaran *amar ma'ruf nabi munkar*, seseorang memiliki keimanan yang tinggi yang mewujudkan dalam kemampuannya secara aktif menjadi kreator, serta proaktif dan antisipatif dalam membangun kembali kehidupan masyarakatnya.⁵³

Model pembelajaran berwawasan rekonstruksi sosial berlandaskan tauhid ini sangat cocok untuk masyarakat atau daerah yang memiliki problem sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya serta berkeinginan untuk berubah dan potensial untuk maju. Sedangkan wacana pendidikannya adalah mengembangkan pendekatan andragogis, dan guru-guru yang ada di dalamnya berobsesi untuk berfungsi sebagai orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggungjawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masyarakat. Di sini para pendidik diharapkan sekaligus menjadi aktivis sosial atau sebagai da'i di masyarakat, yang melekat pada dirinya aspek-aspek idealitas, ketokohan dan keteladanan, serta siap melakukan gerakan sosial *amar ma'ruf nabi munkar*.⁵⁴

⁵³Mohammad Arkoun, *rethinking Islam*, terjemahan asli dari *Retbinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, oleh Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 83-99.

⁵⁴Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam. Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, h. 116.

⁵²Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam. Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, h. 114.

Menurut teori rekonstruksi sosial berlandaskan tauhid, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran peserta didik akan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia, yang merupakan bagian dari kewajiban dan tanggungjawab orang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memecahkan persoalan yang dihadapi oleh umat manusia yang terkait dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Bahkan pendidikan bertugas untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan semua problem tersebut sebagai wujud dari partisipasi dalam melakukan *ishlah* (perbaikan) dan amar *ma'ruf nahi munkar*, sehingga dapat terwujud suatu tatanan masyarakat baru yang lebih baik.⁵⁵

Output-nya diharapkan memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain, sanggup menganalisis dan memecahkan kepincangan-kepincangan sosial atau masalah-masalah lainnya di masyarakat, terpenggil untuk membantu kelompok yang lemah, memiliki komitmen untuk senantiasa memihak kepada si lemah, dan selalu berupaya untuk menjembatani perbedaan paham dan memelihara *ukhuwah islamiyah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhaimin mengatakan, peserta didik perlu dibekali kemampuan-kemampuan: (1) mendeteksi masalah-masalah atau isu-isu krusial yang berkembang di masyarakat untuk selanjutnya diangkat menjadi tema-tema proyek atau kaji tindak; (2) melek berpikir kritis (*critical literacy*); (3) bagaimana strategi dan teknik berhubungan dengan masyarakat; (4) bekerja secara kelompok atau kooperatif dan kolaboratif; (5) menghargai yang lain; (6) cara kerja untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Karena itu, sekolah digunakan sebagai sarana atau wahana untuk melakukan perubahan sosial, dan sebagian besar waktu kegiatan belajar lebih diarahkan ke luar kelas.⁵⁶

Kurikulumnya memusatkan perhatian pada masalah-masalah sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dan mengharapkan

⁵⁵Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, h. 116.

⁵⁶Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 53-60.

agar peserta didik dapat memecahkan masalah-masalah tersebut melalui pengetahuan dan konsep-konsep yang matang. Dengan demikian, diharapkan peserta didik dapat berinteraksi, bekerja sama dengan para guru, dan sesama peserta didik lainnya, maupun sumber-sumber belajar yang tersedia, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.⁵⁷

Dalam konteks ini, guru lebih berperan sebagai *project director*, yang mampu memimpin transformasi dan menjadi agen perubahan dan bersama dengan peserta didiknya berusaha membentuk masyarakat baru. Oleh karena itu, agar peranan guru menjadi lebih efektif, mereka selayaknya menjadi aktivis sosial atau da'i yang senantiasa mengajak orang lain tanpa bosan dan lelah, kepada kebajikan atau petunjuk-petunjuk Ilahi, menyuruh masyarakat kepada yang *ma'ruf* dan mencegah mereka dari yang *munkar*.⁵⁸

Pembelajarannya dapat menggunakan metode-metode simulasi, bermain peranan (*role-playing*), menerjunkan peserta didik ke masyarakat yang menjadi sasaran proyek, serta belajar bekerja di masyarakat (*work study*). Manajemen kelasnya diupayakan untuk tidak terlalu terikat pada belajar di kelas, lebih banyak di luar kelas, tidak membedakan jenis kelamin dan ras, berusaha menciptakan suasana *think tank*, serta membangun masyarakat (*community building*).⁵⁹

Interaksi pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran lebih bersifat dinamis, kritis, progresif, terbuka, bahkan bersikap proaktif dan antisipatif, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai kooperatif dan kolaboratif, toleran, serta komitmen pada hak dan kewajiban asasi manusia. Pada tataran operasionalnya, dapat dikembangkan *peace education* sebagai model pendidikan. *Peace education* adalah model pendidikan yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu mengatasi

⁵⁷Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi*, h. 53-60.

⁵⁸QS Ali Imran (3) ayat 103-105

⁵⁹Hasan Langgulong, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 258-271

konflik atau masalahnya sendiri dengan cara kreatif dan bukan dengan kekerasan. Misalnya dalam belajar kelompok, peserta didik terlatih memecahkan persoalan-persoalan bersama, dengan berbagai model transaksi sosial-psikologisnya. Melalui belajar kelompok, peserta didik akan terlatih untuk menekan egoismenya dan menghargai hak-hak orang lain.⁶⁰

Evaluasi pembelajaran menekankan pada evaluasi formatif, dengan asumsi bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang lebih maju dan meningkat secara berkelanjutan, serta kemampuannya untuk membangun masyarakat yang lebih baik dengan memerankan ilmu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemampuan, minat, bakat, dan prestasi belajarnya secara terus-menerus melalui pemberian umpan balik. Selain itu, karena pembelajaran berwawasan rekonstruksi sosial berlandaskan tauhid lebih menekankan pada belajar kelompok yang dinamis, kooperatif dan kolaboratif, evaluasi atau penilaiannya juga dilakukan secara kooperatif.⁶¹

Mengakhiri penjelasan ini, produk yang diharapkan dalam pendidikan rekonstruksi sosial berlandaskan tauhid adalah terciptanya mobilitas sosial yang terus-menerus. Hasilnya adalah meningkatnya tangga-tangga kehidupan sosial yang dinikmati oleh peserta didik dari satu jenjang stratifikasi sosial ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Proses ini berlangsung terus, berlangsung secara dinamis dialektis menuju masyarakat ideal menurut cita-cita Islam, yakni *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

G. Penutup

Mobilitas sosial merujuk pada suatu gerak perpindahan seseorang (individu) atau sekelompok orang dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, yang secara vertikal dapat naik

atau turun dalam tangga stratifikasi sosial. Pendidikan dengan lembaga-lembaganya yang tertata secara manajerial, mulai dari pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal, sama-sama mengusung dan menjadikan dirinya sebagai jembatan bagi manusia secara individu dan kelompok untuk bersiap-siap memasuki kehidupan masyarakat yang lebih baik untuk hari ini dan yang akan datang.

Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang mewujudkan sebagai ikhtiar pengembangan potensi peserta didik menuju kepada aktualisasi kekhalfahannya melalui teraktualisasi melalui kesanggupannya dalam membangun peradaban. Proses bekerjanya pendidikan sebagai saluran mobilitas sosial tergantung pada kondisi masyarakat. Menerapkan konsep pembelajaran berwawasan rekonstruksi sosial, sangat layak untuk dipertimbangkan. Model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dan diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang lebih baik. Rekonstruksi pendidikan yang akan dibangun adalah terciptanya Negara ideal, dimana masyarakatnya secara individual maupun kelompok adalah memiliki kemampuan sains dan teknologi yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai problem dirinya, masyarakat, dan kebangsaan. Maka terciptalah masyarakat dan Negara yang tercerahkan dalam ungkapan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Daftar Pustaka

- Ali, Abdullah Yusuf. *Qur'an. Terjemahan dan Tafsirnya (The Holy Quran, Text, Translation, and Commentary)*, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Arief, Armai. *Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: CRSD Press, 2005).
- Arkoun, Mohammad, *rethinking Islam*, terjemahan asli dari *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, oleh Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos, 1999)

⁶⁰William F. O'neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan*, terjemahan dari judul asli *Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies*, oleh Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 498-499.

⁶¹Zamrani, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), h. 172-175.

- Basrowi, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Buchanan, Robert Angus. *Sejarah Teknologi (History of Technology)*, terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Pall Mall, 2006).
- Fink, Hans. *Filsafat Sosial: Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas (Social Philosophy)*, terj. Sigit Djatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Hassan, Fuad. *Pendidikan adalah Pembudayaan* dalam Tonny D. Widiastono (ed), *Pendidikan Manusia Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004).
- Hidayat, Komaruddin. *Psikologi Beragama: Menjadikan Hidup Lebih Nyaman dan Santun* (Jakarta: Hikmah, 2007).
- Horton, Paul B dan Chester L.Hunt, *Sosiologi (Sociology)*, terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari, cet. 4, ed. 6 (Jakarta: Erlangga 1996).
- Kompas*, Jumat, 18 Maret 2011.
- Kompas*, 23 Mei 2012.
- Langgulung, Hasan, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
- Madjid, Nurcholish. *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Muthahhari, Murtadha. *Dasar-dasar Epistemologi Pendidikan Islam: Teori Nalar dan Pengembangan Potensi serta Analisa Etika dalam Program Pendidikan (Tarbiyatul Islam)*, terj. Muhammad Bahruddin (Jakarta: Sadra Press, 2011).
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto (ed), *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- . *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).
- O'neil, William F., *Ideologi-ideologi Pendidikan*, terjemahan dari judul asli *Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies*, oleh Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Ruwiyanto, Wahjudi. *Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Masyarakat Miskin: Pendekatan Analisis Organisasi secara Kuantitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).
- Soekanto, Soerjono. *Sosilogi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- Suhartono, Suparlan. *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Empat (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).
- Yusuf, Moh. Asror. *Persinggungan Islam dan Barat: Studi Pandangan Badiuzzaman Said Nursi* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009).
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992)
- . *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001).